

**ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN
NAGARI DI KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

TEGUH SAPUTRA
2014/1406069

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

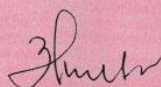
ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN
NAGARI DI KABUPATEN AGAM

Nama : Teguh Saputra
TM / NIM : 1406069 / 2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2018

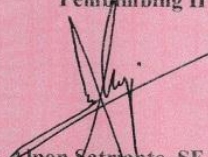
Disetujui oleh :

Pembimbing I



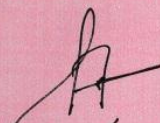
Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP: 19610502 198601 2 001

Pembimbing II



Dr. Alpon Satrianto, SE, ME
NIP: 19850909 201404 1 002

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Dr. Ali Anis, M.S
NIP: 19591129198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

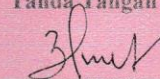
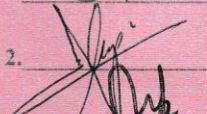
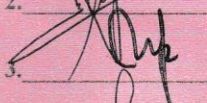
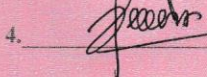
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN
NAGARI DI KABUPATEN AGAM

Nama : Teguh Saputra
NIM/TM : 14060069/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 2018

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	1. 
2	Sekretaris	: Dr. Alpon Satrianto, SE, ME	2. 
3	Anggota	: Mike Triani, SE, MM	3. 
4	Anggota	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Teguh Saputra
NIM / Tahun Masuk : 14060069 / 2014
Tempat / Tanggal Lahir : Pekan Kamis / 22 November 1996
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Ladang Darek. Kec.Kamang Mangek.
Kab.Agam
No. HP / Telepon : 082288116432
JudulSkripsi : Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap
Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, September 2018

Yang menyatakan,




TEGUH SAPUTRA
NIM. 14060069/2014

ABSTRAK

Teguh Saputra 1406069/2014 : Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam, Jurusan ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Di Bawah Bimbingan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS dan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam. (2) Pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam. (3) Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggunakan 82 nagari di Kabupaten Agam dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam, (2) Alokasi Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam, (3) Dana desa dan Alokasi dana desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.

Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mengoptimalkan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa untuk mengatasi masalah sosial yang ada di desa seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan dan lainnya, serta pembangunan yang dilakukan diharapkan pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk bidang pemberdayaan masyarakat harus lebih diperbesar lagi.

Kata kunci: Kemiskinan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S selaku pembimbing (I) dan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE. ME selaku pembimbing (II) yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Teristimewa kepada Orang Tua dan Keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melty Roza Adry, SE. ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mike Triani, SE. M,M selaku dosen penguji (1) dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku dosen penguji (2) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan miral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Kak Lidya dan Kak Yovi yang telah memudahkan urusan administrasi khususnya untuk Jurusan Ilmu Ekonomi
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
9. Vivi Violita Firda dan Suci Rahmalia teman malala.

10. Rifki Ihsan, Adib, Zikir, Fajar, Fauzi, Sabri, Damrul, Afdal, Ronal, Cugik, Beben, serta teman-teman laki-laki lainnya sepermainan.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa bimbingan buk Ulfa dan Pak Alpon.
12. Rekan-rekan sepejuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Juli 2018

Penulis,

Teguh Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	14
1. Teori Kemiskinan.....	14
2. Teori Kebijakan Publik	22
3. Teori Pengeluaran Pemerintah	24
4. Teori Pembangunan Desa	28
5. Dana desa	30
6. Alokasi Dana Desa	32
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Konseptual	38
D. Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Variabel Penelitian	42
D. Jenis Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44

F. Defenisi Operasional.....	44
G. Teknis Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Daerah penelitian.....	57
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	61
1. Deskripsi Kemiskinan	61
2. Deskripsi Dana Desa.....	66
3. Deskripsi Alokasi Dana Desa.....	71
C. Analisis Induktif.....	76
D. Pembahasan Hasil Penelitian	85
1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam.....	85
2. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam.....	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Jumlah dan Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Agam Tahun 2015-2016.....	3
2. Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten Agam pada 2015-2016	10
3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Agam 2015-2016.....	59
4. Jumlah dan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten Nagari di Kabupaten Agam 2015-2016.....	61
5. Jumlah dan Persentase Laju Pertumbuhan Dana Desa yang diterima Kabupaten Nagari di Kabupaten Agam 2015-2016	66
6. Jumlah dan Persentase Laju Pertumbuhan Alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten Nagari di Kabupaten Agam 2015-2016	71\
7. Hasil Uji Chow Test	76
8. Hasil Uji Housman Test	77
9. Hasil Estimasi Fixed Effect	78
10. Hasil Uji Multikolinearitas	80
11. Hasil Uji Heterokedastisitas	81

DAFTAR GAMBAR

1. Lingkaran Setan Kemiskinan.....	17
2. Kerangka Konseptual.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki sebutan yang berbeda sesuai sebutan yang berlaku di daerah setempat, di Sumatera Barat sendiri khususnya Kabupaten Agam dikenal dengan sebutan *Nagari* atau *Kampung*. Kemiskinan merupakan hal yang menjadi momok dalam penyelenggaraan pembangunan Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional hingga daerah terlebih di wilayah pedesaan. Berbagai upaya telah dan terus diupayakan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, bahkan sejak adanya kemiskinan itu sendiri. Ada kecenderungan masyarakat di pedesaan sulit keluar dari permasalahan kemiskinan. Kondisi ini diperparah kurang maksimalnya upaya pemerintah pusat, daerah dan tentunya desa sendiri serta masyarakat untuk benar-benar berupaya mencari jalan keluar dari kemiskinan tersebut (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

Penduduk miskin pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lain yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional, mereka kebanyakan wanita dan anak-anak dari pada laki-laki dewasa, dan mereka sering terkonsentrasi di antara kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Walaupun sebagian besar penduduk dengan kemiskinan absolut tinggal di daerah pedesaan, bagian terbesar dari

pengeluaran pemerintah negara berkembang selama seperempat abad terakhir justru lebih tercurah ke daerah-daerah perkotaan dan sebagai sektor ekonominya, yakni sektor manufaktur modern dan sektor kemersial. Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi langsung ke dalam sektor ekonomi yang produktif atau pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan masyarakat tercurah berat sebelah ke sektor modern perkotaan, dan ini merupakan inti dari berbagai masalah pembangunan (Todaro, 2006:269).

Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit mengatasinya. Kemiskinan bisa terjadi karena memang keadaan yang memaksa seseorang menjadi miskin misalnya krisis ekonomi, keadaan geografis, budaya miskin, akses pekerjaan yang sulit, sarana prasarana dan lainnya. Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemungkinan yang sebenarnya. Sebab banyak orang yang tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan (Prasetyo, 2017). Seperti halnya salah satu daerah yang masih diselimuti kemiskinan di Indonesia yaitu Kabupaten Agam.

Tabel 1
Penduduk Miskin Setiap Kecamatan di Kabupaten Agam
Tahun 2015-2016 (Satuan Jiwa)

No	Kecamatan	2015	2016	Laju (%)
1	Tanjung Mutiara	1.695	2.387	40,83
2	Lubuk Basung	5.287	4.919	-6,96
3	Tanjung Raya	2.890	3.081	6,61
4	Matur	2.288	2.074	-9,35
5	IV Koto	1.946	2.061	5,91
6	Bannuhampu	2.081	1.482	-28,78
7	Ampek Angkek	2.286	1.505	-34,16
8	Baso	3.141	2.742	-12,7
9	Tilatang Kamang	2.515	1.473	-41,43
10	Palupuah	2.099	2.465	17,44
11	Palembayan	3.067	4.180	36,29
12	Sungai Pua	1.240	1.639	32,18
13	Ampek Nagari	1.762	2.082	18,16
14	Canduang	1.381	2.196	59,02
15	Kamang Magek	1.522	1.572	3,29
16	Malalak	982	1.504	53,16
	Kabupaten Agam	36.182	37.362	5,26

Sumber: *Dinas Sosial Kabupaten Agam 2015-2016*

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah penduduk miskin beserta laju pertumbuhan penduduk miskin setiap kecamatan di Kabupaten Agam tahun 2015-2016. Berdasarkan tabel dapat diketahui kemiskinan di Kabupaten Agam mengalami peningkatan tahun 2015-2016 terlihat pada tabel jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 36.182 jiwa dan meningkat tahun 2016 menjadi 37.362 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk miskin sebesar 3,26%. Jumlah keseluruhan kemiskinan memang meningkat, tetapi peningkatan tidak di semua kecamatan di Kabupaten Agam. Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk miskin di 6 kecamatan yaitu Lubuk Basung sebesar 6,9%, Matur 9,3%, Banuhampu 28,7%, Ampek Angkek 34,1%, Baso 12,7%, Tilatang Kamang 41,4%. Dan

selebihnya terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk miskin 10 kecamatan yaitu Tanjung Mutiara, Tanjung Raya, IV Koto, Palupuah, Palembang, Sungai Pua, Ampek Nagari, Canduang, Kamang Magek dan Malalak. Lubuk Basung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 5.287 tahun 2015 dan 4.919 pada tahun 2016, sedangkan kecamatan dengan penduduk miskin terkecil yaitu Kecamatan Malalak yaitu sebanyak 982 pada tahun 2015 dan 1.504 pada tahun 2016.

Penurunan kemiskinan cenderung terjadi pada wilayah yang berdekatan dan berbatasan dengan Kota Bukittinggi yaitu Kecamatan Banuhampu, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang dan Matur. Penurunan mungkin disebabkan karena daerah ini pengaruh interaksi dengan daerah Kota Bukittinggi yang maju dan berkembang menjadi tujuan objek wisata juga. Akses informasi lebih cepat, perdagangan lancar, lapangan pekerjaan banyak tersedia ditambah adanya transportasi *online* yang ada menyerap banyak tenaga kerja dan sebagai karyawan toko serta lain sebagainya. Sehingga penduduk Kabupaten Agam sekitaran Kota Bukittinggi tersebut merasakan dampaknya yaitu seperti menjual hasil pertanian seperti sayuran serta bahan-bahan kebutuhan konsumsi dan hasil industri rumah tangga seperti kerupuk ubi, keripik, serta lain sebagainya. Kondisi ini dikarenakan Kota Bukittinggi yang ramai yang merupakan tujuan wisata sehingga banyak pengunjung dari luar daerah yang pergi berwisata dan berbelanja kesana sehingga transaksi jual beli tinggi disana, Kabupaten Agam sendiri merupakan penghasil produk

pertanian yang menjadi produsen besar karena memang mayoritas masyarakatnya bekerja disektor pertanian dan perkebunan serta perikanan yang didukung oleh lahan yang subur dan iklim serta suhu yang mendukung. Selain itu, Kota Bukittinggi merupakan pusat grosiran terbesar d Sumatera semua barang di beli dari Bukittinggi. Sedangkan penurunan di Lubuk Basung mungkin karena daerah tersebut merupakan pusat ibukota kabupaten sehingga pembangunan terpusat disana membuat daerah Lubuk Basung maju dan berkembang.

Sedangkan peningkatan penduduk miskin terjadi di daerah yang terbelang kurang akses terhadap daerah luar sehingga kurang informasi, sarana prasarana yang belum maemadai juga membuat daerah tersebut sulit berinteraksi dengan daerah luar sehingga daerah tersebut menjadi agak tertinggal. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini jika dilihat dari daerahnya bisa jadi disebabkan karena sulitnya akses informasi dan sarana prasarana seperti karena jauhnya akses dari nagari ke pusat keramaian, pusat perdagangan, serta tempat pendidikan menyebabkan masyarakat tersebut tidak berkembang, tidak mengetahui kemajuan dan perkembangan yang terjadi dan karena kurangnya akses sarana prasarana membuat masyarakat yang mau menjual hasil olahan dan hasil pertanian mereka menjadi sulit dan harus mengeluarkan biaya transportasi yang mahal sehingga keuntungan yang didapat tidak seberapa. Selanjutnya karena akses pendidikan jauh dan biaya yang mahal membuat masyarakat yang menyekolahkan anak mereka tidak mampu mebiayai sekolah anaknya karena biaya yang mahal dan kondisi

perekonomian mereka yang tidak memadai membuat rendahnya kualitas sumber daya manusianya dan semakin meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Sumatera Barat dan merupakan salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Barat yang terdiri dari 16 kecamatan, 82 nagari dan 467 jorong yang letaknya terpisah lumayan jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Agam. Jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2014 mencapai 478.490 jiwa. Kondisi lahan yang terdapat di wilayah ini merupakan perbukitan/ pegunungan dan pesisir serta kawasan lindung. Basis ekonomi adalah pertanian yang terdiri dari perkebunan, pertanian lahan kering, lahan basah, hortikultura dan peternakan dengan kondisi iklim yang mendukung sepanjang tahun serta perikanan.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan antarwilayah antara desa dan kota pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan yang disebut Kebijakan Dana Desa yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 dan kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 2015. Dalam UU ini pemerintah menerapkan paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan pedesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan ke pedesaan

sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan karena dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan merata sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang (Kementrian PDPT, 2015).

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU ini juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan Desa. Lebih dari pada itu, UU Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan. UU No.6 Tahun 2014 dibuat pemerintah tentang desa dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan otonomi desa yang disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2014. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan bisa mengakomodasi semua tuntutan dan kepentingan pemerintah dan masyarakat desa. Di samping itu keberadaan pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin jelas. UU ini juga memberi implikasi positif bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Mengingat perkembangan dan kemajuan desa akan bersinergi dengan

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah karena bagian terbesar masyarakat ada di desa yaitu dengan sejahteranya masyarakat desa dan meratanya pembangunan.

Perubahan paling mendasar dalam UU No.6 Tahun 2014 adalah ketidakadilan dan konsep pembangunan nasional yang terpusat di kota dengan mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tidak terjadi lagi. Kondisi ini dikarenakan desa diberi anggaran yang memadai setiap tahunnya untuk pembangunan dan kesejahteraan dalam kebijakan dana desa yaitu yang bersumber dari APBN yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD. Dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah pasti banyak dampak positifnya karena sebelumnya desa sulit berkembang karena kurangnya anggaran untuk mempercepat pembangunan di desa dan mengatasi masalah-masalah sosial di desa, sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan dana desa ini diantaranya yaitu berkurangnya urbanisasi dari desa ke kota karena kemiskinan di desa yang disebabkan oleh banyak hal. Dengan adanya dana ini diharapkan kemiskinan di desa bisa dikurangi dan pembangunan berjalan cepat di desa sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.

Tantangan terbesar pertama pelaksanaan UU Desa adalah bagaimana dana yang masuk ke desa tersebut dapat dibagi adil kepada 74.754 desa, mengingat tingginya keberagaman ukuran jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan tingkat kemajuan desa di Indonesia. Tantangan terbesar kedua adalah bagaimana anggaran desa dapat dan digunakan secara

efisien dan efektif oleh desa untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Kementerian PDPT, 2015).

Tabel 2
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Kecamatan Kabupaten Agam Tahun 2015-2016 (Satuan Rupiah)

No	Kecamatan	Dana Desa		Laju (%)	Alokasi Dana Desa		Laju (%)
		2015	2016		2015	2016	
1	Tanjung Mutiara	975.231.990	2.246.291.038	130,3	1.553.970.028	2.776.005.003	79,6
2	Lubuk Basung	1.669.531.767	3.914.949.393	134,4	2.488.881.360	3.459.785.461	39,1
3	Tanjung Raya	2.648.302.527	5.881.581.099	122,1	4.239.709.106	5.599.115.255	32,2
4	Matur	1.745.968.888	3.877.370.822	122,1	2.694.172.406	3.515.639.247	30,4
5	IV Koto	2.058.594.160	4.503.521.504	118,7	2.833.071.224	3.912.034.441	38,1
6	Bannuhampu	2.044.509.983	4.482.078.639	119,2	3.031.801.605	4.152.962.135	36,9
7	Ampek Angkek	2.043.429.395	4.498.498.558	120,1	2.276.474.781	3.828.121.440	68,1
8	Baso	1.775.089.655	3.990.992.000	124,8	2.440.446.172	3.597.775.905	47,4
9	Tilatang Kamang	912.075.178	2.075.363.006	127,5	1.951.875.225	2.989.844.665	53,2
10	Palupuah	1.225.481.697	2.868.445.860	134,1	2.611.884.912	3.973.708.689	52,1
11	Palembayan	1.875.695.726	4.365.383.830	132,7	3.253.230.176	5.328.608.315	63,7
12	Sungai Pua	1.488.611.310	3.261.143.388	119,1	2.284.867.884	3.276.820.194	43,4
13	Ampek Nagari	1.300.113.204	2.863.486.464	120,2	1.997.687.883	3.212.968.553	60,8
14	Canduang	919.164.572	2.072.584.947	125,4	1.365.184.706	2.223.018.827	62,8
15	Kamang Magek	583.981.057	1.284.516.772	119,9	1.882.052.943	2.776.671.713	47,5
16	Malalak	1.171.396.461	2.616.859.025	123,3	2.037.445.735	2.823.632.768	38,5
	Kab.Agam	24.751.325.000	55.566.447.000	124,4	39.245.623.229	58.882.792.990	50,1

Sumber: *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari 2015-2016.*

Tabel 1.2 memperlihatkan besaran jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa beserta laju pertumbuhan yang diterima setiap kecamatan di Kabupaten Agam tahun 2015-2016. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa setiap

kecamatan di Kabupaten Agam mengalami kenaikan penerimaan Dana Desa Maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015-2016. Dari tabel dapat diketahui bahwa Dana Desa mengalami kenaikan yang signifikan di setiap kecamatan di Kabupaten Agam dengan laju pertumbuhan dana desa sebesar 124,4%, laju pertumbuhan Dana Desa terbesar yaitu pada Kecamatan Lubuk Basung sebesar 134,4% dan laju pertumbuhan terkecil pada Kecamatan IV Koto sebesar 118,7%. Tidak hanya Dana Desa, penerimaan Alokasi Dana Desa juga mengalami kenaikan yang signifikan setiap kecamatan di Kabupaten Agam dengan laju pertumbuhan sebesar 50,1%, dengan laju pertumbuhan Alokasi Dana Desa terbesar pada Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar 79,6%, dan laju pertumbuhan Alokasi Dana Desa terendah pada Kecamatan Matur yaitu sebesar 30,4%. Pembagian peningkatan besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah diatur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Kenaikan penerimaan dana desa dan alokasi dana desa ini karena kenaikan APBN Indonesia sehingga penerimaan alokasi untuk dana desa juga mengalami peningkatan ditambah lagi pemerintah memang serius untuk menjalankan program kebijakan dana desa untuk mempercepat pembangunan di desa dalam upaya mengurangi ketimpangan antara desa dengan kota, meningkatkan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan (Detikfinance, 2016). Peningkatan pembagian dana ini telah diatur oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) sehingga pembagian dana desa dan alokasi dana desa ini telah dibagi sesuai

dengan indikator pembagian yang telah ditetapkan dengan prinsip merata dan berkeadilan.

Banyak kasus yang terjadi pada Dana Desa diantaranya terjadinya penyelewengan Dana Desa oleh oknum desa yang tidak bertanggung jawab. Dalam praktiknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, terutama elit lokal di tingkat desa. Kementerian PDTT mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait dana desa sebanyak 932 pengaduan. Sebanyak 200 laporan diantaranya diserahkan kepada KPK, sedangkan 167 diserahkan kepada kepolisian, dan sisanya merupakan permasalahan administrasi. Permasalahan yang terjadi dalam dana desa jika dibandingkan dari jumlah desa sebanyak 74.910 tergolong kecil (Tirto.id, 2017).

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Agam yang penggunaannya tentu banyak program pembangunan dan pemberdayaan serta pemerintahan yang semakin baik. Namun, jika kita lihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam pada Tabel 1 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di sejumlah wilayah yang bisa dibilang masih tertinggal padahal telah ada dana desa dan alokasi dana desa yang digunakan untuk nagari yang dikelola langsung oleh nagari penggunaannya untuk pembangunan, pemberdayaan dan pembiayaan pemerintahan tapi kemiskinan tidak menurun dan malah terjadi peningkatan. Apabila dikaitkan antara Tabel 1 yaitu jumlah penduduk miskin dengan Tabel 2 yaitu dana desa dan alokasi

dana desa seharusnya dengan kenaikan penerimaan dana desa sebesar 124,4% dan alokasi dana desa sebesar 50,1% dapat menurunkan kemiskinan di Kabupaten Agam. Namun pada kenyataannya terlihat pada tabel kenaikan penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak menurunkan kemiskina dan justru kemiskinan meningkat sebesar 5,26%. Kondisi ini memperlihatkan fenomena Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Agam, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan dengan judul “**Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan masalah rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan nagari di Kabupaten Agam?
2. Sejauh mana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap nagari kemiskinan di Kabupaten Agam?
3. Sejauh mana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan nagari di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan nagari di Kabupaten Agam.

2. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan nagari di Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara bersama-sama terhadap kemiskinan nagari di Kabupaten Agam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian yang didapatkan berguna bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan Ilmu Ekonomi yaitu dalam Ilmu Ekonomi Publik.
2. Bagi pengambilan kebijakan tentang dana desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam.
3. Bagi peneliti lebih lanjut mengenai kebijakan dana desa terhadap kemiskinan.
4. Bagi peneliti sendiri dalam rangka untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

a. Konsep Kemiskinan

Pengertian arti dari kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut telah merambat pada level multidimensional, artinya kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan. Menurut BPS ada suatu penurunan yang berkesinambungan dalam persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan, di Indonesia sejak tahun 1976. Kendati demikian, penduduk perkotaan berkembang lebih cepat dibanding penduduk pedesaan, sehingga penurunan dalam jumlah absolut kemiskinan jauh lebih lambat dari total kaum miskin tahun 1987 (Kuncoro, 2006: 129).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan secara subyektif dan

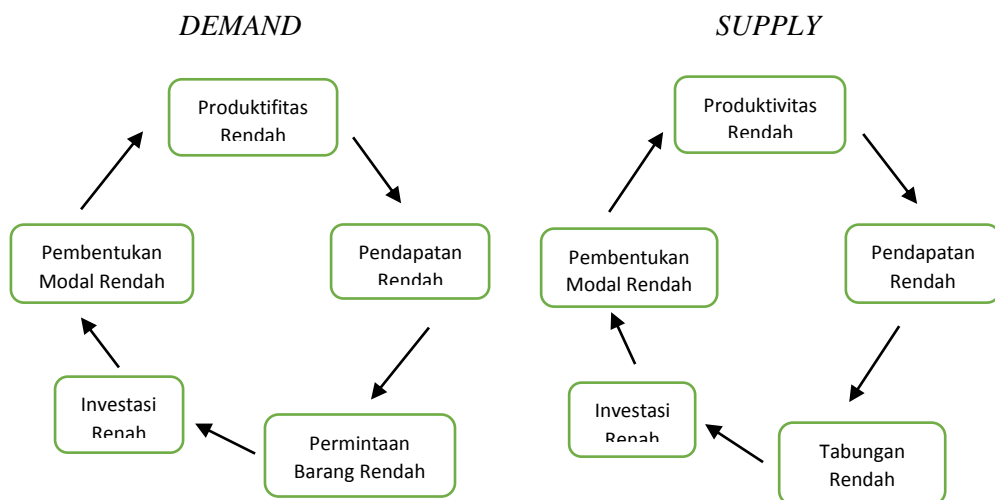
komperatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain (Satrianto, 2017: 77).

Menurut BPS (2008), berbagai masalah kemiskinan dapat dikelompokkan dalam *terminologi*, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut menurut BPS, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar yang dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Selain kemiskinan absolut, terdapat juga konsep kemiskinan kultural dan kemiskinan relatif (Sumodiningrat, 1998:30). Kemiskinan kultural disebabkan pemahaman suatu sikap, kebiasaan hidup dan budaya seseorang atau masyarakat yang merasa kecukupan dan tidak kekurangan. Secara umum, kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha pihak luar untuk membantu. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin.

Konsep kemiskinan didasarkan adanya perangkat kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Lingkaran setan kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi yang ditentukan oleh tingkat tabungan untuk menanam modal. Di negara sedang berkembang kedua faktor ini tidak mungkin dilaksanakannya tingkat pembentukan modal tinggi. Teori ini ditemukan oleh Nurkse 1953 (Jhinghan, 2012:33).

Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*) versi Nurkse:



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan
Sumber: Nurkse 1953 (dalam Jhinghan, 2012:34)

Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap

pembangunan yang terjadi pada negara sedang berkembang. Satu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang. Ia terbelakang karena ia miskin dan tetap terbelakang karena tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk peningkatan pembangunan.

Jika dilihat dari sudut penawaran, produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya berakhir pada produktivitas yang rendah (Jinghan, 2012:33-34). Faktor pertama yaitu faktor yang berasal dari luar diri penduduk miskin terdiri dari kekurangan investasi, sarana, informasi dan lain-lainnya. Faktor kedua adalah faktor yang bersumber dari penduduk sendiri seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kekayaan dan lain-lainnya.

Menurut Todaro dan Smith (2006:414), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan karena interaksi antara 6 karakteristik berikut yaitu:

- 1) Tingkat pendapatan nasional di negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan per kapita di negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami *stagnasi*.
- 3) Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.

- 4) Mayoritas penduduk di negara berkembang harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan dan kurang memadai untuk pelajar di Indonesia.

Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut Todaro (2006:267) meluasnya tingkat kemiskinan dapat menyebabkan suatu kondisi dimana penduduk miskin tidak dapat meningkatkan pendidikan, selain itu tidak memiliki akses terhadap pinjaman kredit yang dapat dijadikan modal usaha atau peluang investasi yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan per-kapita menjadi lebih kecil.

b. Ukuran Kemiskinan

Menurut Todaro (2006:246) selain *headcount indeks* terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan indeks keparahan kemiskinan (*distribuyionally sensitive index*) atau $P\alpha$ yang dirumuskan oleh *Foster-Geer-Thorbecke*. Indeks $P\alpha$ adalah sebagai berikut:

$$P\alpha = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^Q \left(\frac{Z-Yt}{Z} \right) \alpha \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana:

Z = garis kemiskinan

\hat{y} = rata-rata pengeluaran per-kapita penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

Q = banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

N = jumlah penduduk

$\alpha = 0,1,2$

$\alpha = 0$; *povety head indeks* (PO)

$\alpha = 1$; *povety gap indeks* (PI)

$\alpha = 2$; *povety distributionally sensitive indeks* (P2)

Satu lagi ukuran kemiskinan diperkenalkan oleh UNDP dalam laporannya pada *Human Development Report* tahun 1997 yaitu Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*) mengatakan bahwa kemiskinan diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivations*), yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen penduduk negara-negara yang paling miskin cenderung hidup kurang dari 40 tahun), pendidikan dasar (diukur dari persentase penduduk dewasa yang buta huruf) serta keseluruhan ketetapan ekonomi yang diukur dari persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kurang berat badan (Todaro, 2006:247).

Metode perhitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs aproach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan didefenisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu, indikator yang digunakan adalah *Headcount Indeks* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Batas kemiskinan menurut BPS (2010) ditunjukkan oleh pendapatan perkapita perbulan Rp. 27.905 untuk perkotaan dan Rp. 13.244 untuk pedesaan. Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Batas garis kemiskinan Biro Pusat Statistik didasarkan pada kebutuhan kalori minimum perhari yaitu 2100 kalori ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti pakaian dan kesehatan. Berdasarkan pendekatan itu, indikator yang digunakan adalah *Headcount Indeks* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Amar 2012:33-68)

Garis kemiskinan merupakan patokan terpenting untuk mengukur tingkat kemiskinan. Oleh karena itu kebijaksanaan untuk mengatasi kemiskinan akan terkait dengan tolak ukur garis kemiskinan. Selanjutnya menurut Todaro (2006:243), kemiskinan dapat dilihat dari beberapa pendekatan atau sudut pandang antara lain dari segi ekonomi atau dari aspek pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan

kesehatan), yang ukurannya sangat relatif dan sangat ditentukan oleh penetapan garis kemiskinan oleh masing-masing negara.

c. Faktor Penentu Kemiskinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi budaya dan sosial. Kemiskinan juga merupakan konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan prespektif analisa. Menurut *World Bank* (2010) ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

- 1) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
- 2) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.
- 3) Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan dalam menanggulangnya.

Menurut Amar (2012:34) faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain adalah:

- 1) Faktor sosial ekonomi, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan produktivitas yang rendah.
- 2) Disisi lain, faktor yang berasal dari luar hubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan penduduk miskin yaitu penduduk yang berpendapatan rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup yang diukur berdasarkan garis kemiskinan yang telah ditetapkan, yang disebabkan oleh kebikjaksanaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang belum mencapai seluruh masyarakat dan pembentukan modal yang rendah terlebih wilayah pedesaan. Hal ini berdampak pada pendapatan rendah, pendidikan rendah, lapangan kerja terbatas, kurangnya akses informasi dan teknologi karena pemerintah yang kurang memperhatikan penduduk miskin dan lain sebagainya.

2. Teori Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai defenisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye memberikan defenisi kebijakan sebagai pilihan pemerintah melakukan atau tidak melekukan sesuatu (*whatever goverments choose to do or not to do*). Sementara itu, Anderson menyampaikan defenisi kebijakan publik yang lebih spesifik, yaitu sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” (Suharto,2012:44).

Kebijakan Publik merupakan tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial

untuk melakukannya, yang berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongrit yang berkembang di masyarakat (Suharto, 2012:45).

Menurut Heglo menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan tertentu yaitu tujuan yang dikehendak di untuk dicapai, bukan hanya sekedar keinginan saja. Kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis, oleh karena itu dari suatu kebijakan di rumuskan secara bijak dan matang agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Sedangkan menurut Jones kebijakan yaitu perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum (Abidin, 2012:6).

Dengan perkembangan studi yang makin maju, Dunn mendefenisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari (Abidin, 2012:7).

Pengertian publik dalam rangkaian kata *publik policy* memiliki 3 konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan resmi yang sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk menyetujuinya. Dalam dimensi kebijakan, pengertian publik di sini adalah masyarakat, oleh karena itu setiap kebijakan harus melihat bagaimana kondisi masyarakat sebelum membuat kebijakan. Seorang presiden membuat kebijakan yang bersifat umum, menteri-menteri

membuat kebijakan implementasi atau pelaksanaan dan para eselon I dan II membuat kebijakan-kebijakan teknis (Abidin, 2012:8).

Kebijakan Publik atau Kebijaksanaan Pemerintah ialah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang berwenang untuk kepentingan rakyat yaitu keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan, dan tuntutan-tuntutan dari rakyat (Soenarko, 2000:43)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang yang berlandaskan hukum mempunyai kewenangan dapat memaksa masyarakat menyetujuinya. Keputusan tersebut setelah melalui berbagai proses dan metode serta informasi untuk memecahkan permasalahan dalam masyarakat sehingga keputusan tersebut diambil berdasarkan keadaan yang ada dan keputusan dapat diterima oleh masyarakat. Baik atau tidaknya kebijakan pemerintah tergantung kualitas pemerintah itu sendiri apakah pemerintah benar-benar memperhatikan masyarakatnya atau tidak. Dengan kualitas kebijakan yang baik tentu akan berdampak positif bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masalah kemiskinan dapat dikurangi.

3. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan

pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Dalam APBN pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin biasanya untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi, angsuran utang dan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak yang diterima pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah yaitu berupa penyediaan sarana dan prasarana seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, rumah sakit irigasi dan infrastruktur lainnya dimana dilakukan untuk kepentingan masyarakat (Sukirno, 2006:38).

Menurut Kuznets (Jhinghan, 2012:337) pembentukan modal domestik tidak hanya mencakup biaya untuk konsumsi, peralatan dan persediaan dalam negeri, tetapi juga pada pengeluaran lain. Jadi istilah pembentukan modal lebih luas lagi yaitu meliputi modal material dan modal manusia. Pembentukan modal manusia misalnya dengan melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk

membayai pendidikan dan pelatihan untuk pekerja sehingga meningkatkan pengetahuan dan keahlian pekerja. Dengan meningkatnya kualitas pekerja maka produktivitas mereka juga akan meningkat pula.

Teori pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi dua bagian diantaranya yaitu teori Makro yang terdiri dari Teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang pertama WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar untuk menyediakan sarana prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan lainya. Selanjutnya, pada tahap menengah investasi pemerintah diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas, namun pada saat ini peranan investasi swasta sudah makin membesar. Terakhir, pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari persediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Mangkoesubroto, 2001:170).

Kedua hukum *Wagner* mengukur dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional, ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi

perkembangan pemerintah (Mangkoesubroto, 2001:172). Hukum wagner dapat diformulasikan sebagai beriku:

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n} \dots\dots\dots(2.2)$$

Yang ketiga Teori *Peacock* dan *Wiseman* menurutnya pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan pajak, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula pengeluaran pemerintah. *Peacock* dan *Wiseman* mendasarkan suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mangkoesubroto, 2001:173).

Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat yang digunakan untuk membiayai belanja rutin pemerintah dan pembiayaan pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarana seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, rumah sakit irigasi dan infrastruktur lainnya dimana dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Apabila pengeluaran pemerintah ini digunakan sebaik-baiknya dalam pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengeluaran ini tidak berat sebelah antar desa dan kota serta tidak terjadi ketimpangan dalam pengelolaannya nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan akan menjadi menurun.

4. Teori Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menyediakan lapangan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah-wilayah yang masih terbelakang. Pembangunan wilayah diperlukan karena kondisi, permasalahan dan potensi setiap daerah berbeda-beda (Sjafrizal, 2012:163).

Pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa diolakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan (Kartasasmida, 2001:66).

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang dan sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat yaitu merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri (Suparno, 2001:46).

Pembangunan di desa merupakan pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang

telah lama berakar budaya wilayah Indonesia (Pemendagri No 66 Tahun 2007).

Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Kementrian PDPT, 2015:1).

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Kementrian PDPT, 2015:1).

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) yang diatur oleh Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencanakegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementrian PDPT, 2015:5).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan di desa yang merupakan keinginan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah desa dengan pemerintah sebagai pendamping pelaksanaan dan memfasilitasi dalam pembangunan desa. Desa tentu tau apa potensi yang dapat dikembangkan oleh desa dan masalah yang harus diatasi maka pembangunan desa harus memperhatikan keadaan desa tersebut sesuai apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Apabila pembangunan desa terlaksana dengan baik tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta kemiskinan akan berkurang.

5. Dana Desa

Dana Desa merupakan kebijakan baru yang di buat pemerintah semua di atur dalam UU No.6 Tahun 2014 yang baru di alokasikan pertama kali tahun 2015. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang berasal dari pemerintah pusat. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa dimaksudkan sebagai bantuan simultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana

Desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Tentang peraturan mengenai pengalokasian dan penggunaan Dana Desa di atur sendiri oleh Bupati/Wali Kota yang bersangkutan dalam Perda.

Berdasarkan Peraturan Menteri pasal 25 PMK 247 dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Peraturan Bupati No 3 pasal 2-4 Tahun 2016 tentang pengalokasian dana desa untuk setiap nagari:

1. Nagari dialokasikan secara merata dan berkeadilan untuk setiap nagari berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.
2. Besaran alokasi dasar mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden No 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017.

3. Besaran alokasi formula dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk (25%), angka kemiskinan (35%), luas wilayah (10%) dan indeks ketinggalan geografis nagari (30%).
4. Indeks ketinggalan geografi yang dimaksud disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Pengalokasian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan tahap I 40% dan tahap II 60% untuk setiap nagari berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2-10 PMK 247/2015 bahwa pengalokasian alokasi dasar yaitu 90%, artinya 90% dari dana desa dibagi merata kepada setiap desa. Sedangkan alokasi formula yaitu sisanya 10% dibagi berdasarkan jumlah penduduk (25%), luas wilayah (10%) dan angka kemiskinan (35%) dan indeks ketinggalan geografis (30%). Dengan pembagian tersebut tentu desa memiliki dana yang cukup besar untuk dikelola dan akan memberikan alokasi yang besar kepada nagari yang tinggi kemiskinan dan nagari tertinggal sesuai indeks ukuran yang ditetapkan, dengan alokasi yang besar tersebut seharusnya diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mengatasi masalah seperti masalah kemiskinan di nagari.

6. Alokasi Dana Desa

Kebijakan pengaturan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk rumusan besaran yang diserahkan kepada masing-masing desa yang dananya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah serta Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor : 140/640/SJ perihal

Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa yaitu bersumber dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota (Kementrian PDPTT).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2-10 PMK 247/2015 bahwa pengalokasian alokasi dana desa kepada desa yaitu berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar yaitu ditetapkan pemerintah x jumlah desa. Sedangkan alokasi formula yaitu (pagu dana desa – alokasi dasar) selanjutnya dibagi berdasarkan indikator jumlah penduduk (25%), jumlah penduduk miskin(35%), luas wilayah (10%), indeks ketinggalan geografis (30%).

Tahap penyaluran alokasi dana nagari berdasarkan Peraturan Bupati Agam No 2 Tahun 2016 Pasal 10 adalah:

1. Tahap I, pada bulan Februari sebesar 40%
2. Tahap II, pada bulan Juli sebesar 40%
3. Tahap III, pada bulan November sebesar 20%

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam No 2 Tahun 2016 Pasal 1 Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Alokasi Dana Nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Bupati Kabupaten Agam No 2 pasal 4-6 Tahun 2016 tentang pengalokasian alokasi dana desa yaitu mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap walinagari dan perangkat nagari dihitung dengan menggunakan data jumlah walinagari dan perangkat nagari di setiap nagari.
2. Jumlah penduduk yang dihitung dari data jumlah penduduk nagari.
3. Angka kemiskinan yang dihitung dari jumlah rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial dan bantuan sosial di nagari.
4. Luas wilayah nagari.
5. Indeks kesulitan geografis ditetapkan berdasarkan:
 - a. Prasarana pelayanan dasar seperti ketersediaan akses TK, SD, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, tempat praktek dokter dan lainnya.
 - b. Ketersediaan infrastruktur pertokoan, ketersediaan dan akses ke pasar, akses rumah makan/warung makan, akses akomodasi penginapan, akses ke bank, akses energi listrik, penerangan jalan dan lainnya.
 - c. Aksebelitas atau transportasi seperti lalu lintas dan kualitas jalan, ketersediaan angkutan umum, lama waktu menuju kantor camat,

lama waktu menuju kantor bupati, biaya transportasi menuju kantor bupati.

Tujuan Alokasi Dana Nagari yaitu meningkatkan penyelenggaraan nagari dalam pelayanan pemerintah, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pembangunan sesuai potensi nagari, meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja serta berusaha masyarakat nagari, mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. Apabila tujuan Alokasi Dana Desa tersebut terlaksana dengan baik tentu akan membuat nagari menjadi maju serta berkembang sehingga masalah seperti kemiskinan akan bisa teratasi.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Qin (2015:23) menunjukkan bahwa program *Poor Counties National* di Cina memiliki efek yang negatif di beberapa tahun dan gagal untuk mengatasi masalah kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama melihat sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada daerah penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di kabupaten yang ada di Negara Cina sedangkan peneliti sekarang meneliti di desa yang ada di Kabupaten Agam, selanjutnya perbedaan pada jenis data penelitian dimana penelitian ini menggunakan data time series tahun 2000-2010 sedangkan peneliti sekarang menggunakan data panel tahun 2015-2016 dengan 82 kabupaten.

Hasil penelitian Mosley (2004) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang pro-kemiskinan berupa bantuan kemiskinan di Afrika tidak efektif mengatasi kemiskinan. Terbukti bahwa penyebabnya yaitu adanya ketidakadilan dalam pembagian dana dari pemerintah dan terjadinya korupsi, ini yang menjadi penyebab bantuan kemiskinan menjadi gagal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama melihat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini melihat pengeluaran pemerintah khusus untuk mengatasi kemiskinan sedangkan sekarang meneliti pengeluaran pemerintah khusus untuk desa dalam mempercepat pertumbuhan di desa.

Hasil penelitian Sari (2017:47) menunjukkan bahwa variabel dari Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2016 serta terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015-2016, penurunan kemiskinan terjadi pada 114 desa. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang variabel dana desa terhadap kemiskinan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada tempat penelitian, dimana penelitian ini bertempat di Kabupaten Tulungagung sedangkan sekarang peneliti meneliti di Kabupaten Agam.

Hasil penelitian Setianingsih (2015:16) menunjukkan Dana Desa untuk pembangunan desa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penduduk miskin. Arah positifnya menunjukkan bertambahnya dana desa maka bertambahnya jumlah penduduk miskin hal ini dikarenakan sosialisasi

dalam penggunaan dana desa baru dilakukan di akhir tahun 2015 yaitu di bulan November, sehingga penggunaan dana desa tidak tepat sasaran. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dana desa terhadap kemiskinan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada data penelitian dimana penelitian ini hanya melihat dana desa sedangkan sekarang peneliti melihat dana desa dan alokasi dana desa.

Hasil penelitian Kementerian PPN/Bappenas (2017:14) menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Terkait dengan penggunaan dana desa, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan (84%), sementara itu penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar (6,5%). Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan maupun pengelolaannya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama meneliti kebijakan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan yaitu pada subjek penelitian, dimana penelitian ini subjeknya adalah kabupaten yang ada di Indonesia yang telah di pilih sedangkan sekarang peneliti meneliti dengan subjek desa yang ada di Kabupaten Agam.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kemiskinan hanya berkurang di beberapa daerah atau desa. dikarenakan pengalokasian dana desa lebih besar di sektor pembangunan dari pada pemberdayaan masyarakat,

dana desa yang merupakan kebijakan baru masih kurang sosialisai, terjadi ketimpangan distribusi dana desa antar kabupaten/kota.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan pada kajian teori di atas.

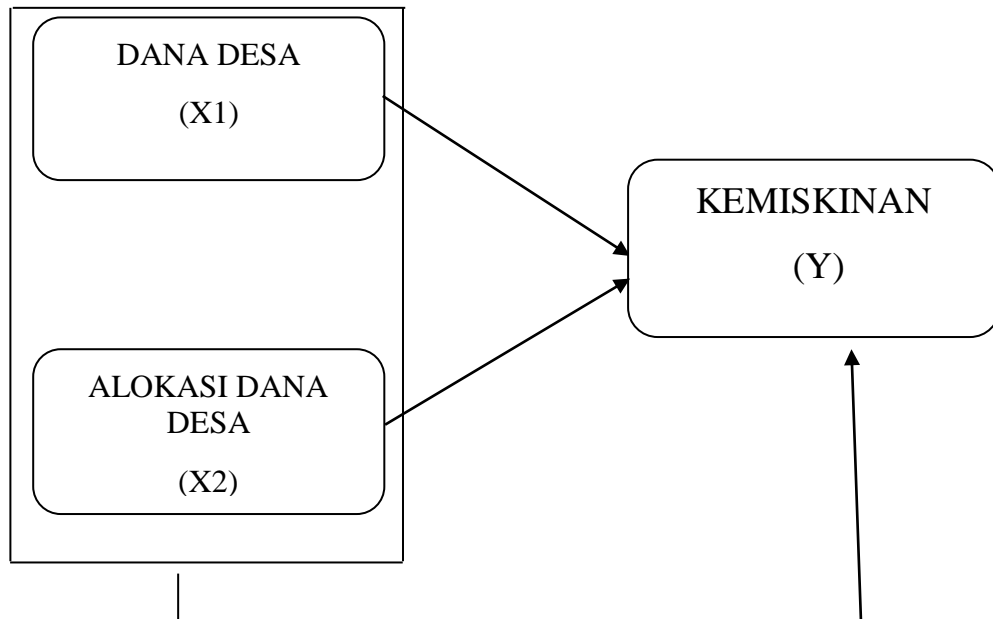
Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas dimana variabel bebas adalah Dana Desa (Nagari) dan Alokasi Dana Desa (Nagari). Sedangkan sebagai variabel terikat yaitu Kemiskinan Desa (Nagari) di Kabupaten Agam.

Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa mengurangi jumlah kemiskinan di pedesaan. Sebab selama ini desa sulit untuk keluar dari kemiskinan karna kurang terperhatikannya desa oleh pemerintah dan desa menjadi semakin tertinggal. Dengan adanya Dana desa, desa memiliki dana yang cukup memadai untuk pembangunan dan pembiayaan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikelola langsung sendiri oleh pemerintah desa. Diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam penggunaannya seperti sarana prasarana terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, pendapatan meningkat akan mendorong

kesejahteraan masyarakat ikut meningkat sehingga angka kemiskinan menurun.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBD yang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah menyalurkan untuk setiap desa dalam mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya juga kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk setiap desa kini desa memiliki dana yang terbilang besar dan memadai ditambah dengan Dana Desa. Pengelolaan dana yang besar ini jika dikelola dengan optimal dan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa akan memiliki dampak positif bagi desa dalam mengatasi berbagai masalah yang terapat di desa seperti kemiskinan. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pembiayaan pemerintahan desa, peningkatan pembangunan dan kelembagaan desa, untuk pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha dengan membangun jiwa gotong royong diharapkan mampu tercipta. Pemerintahan yang baik akan mendorong desa menjadi lebih baik dalam pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dengan pemerataan ini diharapkan kemiskinan juga akan ikut berkurang di desa.

Berikut ini dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dan baru bisa dibuktikan kebenarannya setelah sebuah data empiris diperoleh. Dalam penelitian dapat dirumuskan hipotesis guna memberikan pedoman maupun arah dalam melakukan penelitian. Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Nagari di Kabupaten Agam.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien} \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam selama dua tahun periode penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam. Artinya, semakin meningkat penerimaan dana desa maka kemiskinan akan berkurang di Kabupaten Agam.
2. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam. Artinya, semakin meningkat penerimaan alokasi dana desa maka kemiskinan akan ikut meningkat di Kabupaten Agam.
3. Secara bersama-sama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam maka saran yang diberikan adalah:

1. Setiap pemerintah nagari diharapkan untuk lebih melihat potensi ekonomi untuk dikembangkan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terlebih potensi dibidang pertanian dan perkebunan berupa sayur-sayuran, umbi-umbian, dan bahan kebutuhan pokok lainnya karena

Kabupaten Agam memiliki lahan yang subur, serta mengembangkan potensi pariwisata dengan memperbaiki akses serta sarana prasarana, dimana nagari-nagari di Kabupaten Agam banyak memiliki potensi wisata alam dan wisata sejarah budaya yang akan meningkatkan perekonomian dengan banyaknya wisatawan yang datang.

2. Untuk masing-masing pemerintah desa diharapkan harus mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat seperti pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, pembangunan badan usaha milik nagari yang dimana tenaga kerjanya diserap dari masyarakat nagari dan lainnya. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai jual, pelatihan tenaga kerja, serta bantuan modal usaha.
3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Sehingga dapat memberikan masukan yang lebih lengkap dalam usaha menurunkan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2005. *Statistik 1*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Amar, Syamsul. 2012. *Ekonomi dalam Prospektif Kelembagaan*. Padang: UNP.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abidin, Muhamad Zainul. 2015. "Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 6 No. 1.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Statistik Indonesia*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. 2017. *Statistik Kabupaten Agam*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2017.
- Gujarati, Damondar N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- <http://www.sumbarsatu.com/berita/13458/dana-desa-di-agam-mayoritas-untuk-pembangunan-fisik>. Diakses tanggal 27 Febuari 2018.
- <http://www.detikfinance.com/berita/14525/peningkatan-dana-desa-2016>. Diakses tanggal 27 Februari 2018.
- <http://amp.tritp.id/mengurai-benang-kusut-pengelolaan-dana-desa>. Diakses tanggal 9 Maret 2018.
- Jhinghan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kementrian PDPT. 2015. *Tanya Jawab Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kementrian PDPT.
- _____. 2015. *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kementrian PDPT.
- _____. 2015. *Pengembangan desa*. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kementrian PDPT.
- _____. 2015. *Buku Acuan Kepemimpinan Desa*. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kementrian PDPT.